

## ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

Gusti Ayu Yessila Xena \*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura*

### ABSTRAK

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakatnya dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pajak pada penelitian ini adalah infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pajak menandakan adanya ketergantungan pemerintah daerah khususnya di daerah kalimantan Barat dalam rangka percepatan pembangunan di daerah melalui pembangunan infrastruktur serta untuk peningkatan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Kalimantan Barat dan Dispenda Kalimantan Barat. Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.4365 lebih besar dari 0,05 (probabilitas > 0,05) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap pajak. Kedua hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0291 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pajak.

**Kata Kunci :** *Infrastruktur Jalan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak Daerah*

### 1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakatnya dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai ketentuan akan dikembalikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Pentingnya pajak dalam struktur penerimaan negara dapat dilihat dari kontribusinya terhadap total penerimaan negara maupun kontribusinya terhadap belanja negara. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 744,1 triliun. Kontribusi penerimaan dari sektor

---

\*Gustiayuxena@gmail.com

pajak terhadap penerimaan negara mencapai 73,38 persen. Peranan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara berpengaruh besar pada kebijakan pembiayaan pembangunan, apalagi bila kita menyadari bahwa penerimaan yang berasal dari Sumber Daya Alam semakin terbatas, sehingga pemerintah harus terus berusaha menggali potensi pajak yang ada sebagai sumber penerimaan untuk agar sumber pembiayaan ini dapat terus ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak dan Retribusi daerah.

PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi dari daerah. Penggalan pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat. Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Sesuai dengan misi Presiden Republik Indonesia yang memfokuskan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tujuan percepatan pembangunan infrastruktur jalan diperuntukkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah, pembangunan infrastruktur salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah, artinya dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka secara tidak langsung perkembangan ekonomi juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriany (2018) dan Mongdong (2018) yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Pada penelitian ini infrastruktur jalan yang dijadikan objek penelitian adalah infrastruktur jalan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Infrastruktur jalan yang memadai maka akan dapat memperlancar perekonomian masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sehingga infrastruktur jalan merupakan faktor pendukung yang penting. Pembangunan infrastruktur jalan harus berdampak pada naiknya aksesibilitas, semakin berkurangnya kemacetan, peningkatan kualitas jalan raya. Salah satu tantangan dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterkaitan satu sama lain dan dampak-dampaknya.

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pajak daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Sukirno, 2013). Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut

Sukirno (2013), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 2014).

Provinsi Kalimantan Barat secara administratif terbagi menjadi 14 kabupaten/kota, dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota tentunya akan memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Dengan membandingkan nilai pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, kita dapat melihat perbandingan pembangunan serta melihat tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan melihat kenyataan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota maka peran dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah menjadi semakin penting, karena dituntut harus mampu untuk melakukan fungsi alokasi atas seluruh sumber daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat.

Peningkatan pajak daerah menandakan adanya ketergantungan pemerintah daerah khususnya di daerah Kalimantan Barat dalam rangka percepatan pembangunan di daerah melalui pembangunan infrastruktur serta untuk peningkatan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pentingnya pemerintah daerah se Kalimantan Barat untuk mengelola pajak daerah untuk diperuntukkan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis memilih judul "Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kalimantan Barat".

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD): Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah: Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah: Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari (UU No 33 Tahun 2004):

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

### 2.1.2 Pajak Daerah

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2010<sup>c:1</sup>) pengertian pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu (Sukirno, 2013). Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah PDB (Sukirno, 2013). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai akhir dari PDRB akan sama dengan total nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih. Umumnya PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu PDB harga berlaku (nominal) dan PDB harga konstan (riil). PDB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Jadi, pada PDRB harga berlaku sudah diikutsertakan perhitungan inflasi kedalamnya. PDRB harga konstan meningkat hanya jika jumlah barang dan jasa meningkat, sedangkan PDRB atas harga berlaku bisa meningkat karena produksi naik atau harga turun. PDRB merupakan nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan nilai tambah bruto adalah nilai produksi bruto dari barang dan jasa tertentu dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi (Sukirno, 2013).

## 2.2 Kajian Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Andriany (2018). Penelitian ini berusaha mengeksplorasi hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia. Dengan menggunakan metode stokastik frontier dan data penerimaan pajak mencakup 34 provinsi pada 2011–2016, hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity pajak pusat maupun daerah, sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity pajak daerah. Tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif, baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun daerah. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian cenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax capacity pajak pusat.

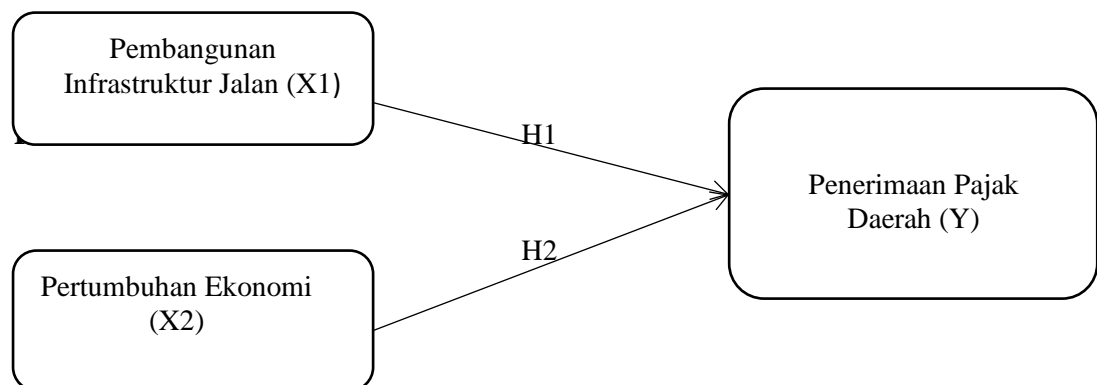
Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan kausal antara variabel pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pendapatan pajak di Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah asosiatif penelitian deskriptif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1986 hingga 2016

yang diperoleh dari Pusat Badan Statistik. Yang dianalisis menggunakan metode Vector Auto Reggresion (VAR) untuk melihat kebalikan hubungan antar variabel yang digunakan. Hasil penelitian ini memiliki hubungan satu arah antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, dan ada juga hubungan searah antara infrastruktur dan penerimaan pajak di Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Triastuti (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007- 2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier data panel, uji F untuk pengujian secara simultan dan uji t untuk pengujian secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2007-2014. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Belanja pembangunan/modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiah (2015). Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menguji dan menganalisis pengaruh belanja pembangunan/modal terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) menguji dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data dari berbagai sumber literatur, dokumentasi atau informasi dari pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) belanja pembangunan/modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) secara parsial dalam hasil penelitian ini menemukan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) dalam hasil analisis uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan mempengaruhi penerimaan pajak.

## **2.2 Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka konseptual di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah pembangunan infrastruktur jalan (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) dianggap variabel bebas yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Y)

yang dapat dikatakan sebagai variabel terikat.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode diartikan sebagai suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Siswanto (2012): “Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian”. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan metode kualitatif digunakan untuk memberikan predikat kepada variabel-variabel persepsi yang dihasilkan dari data deskriptif guna menarik suatu kesimpulan, Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan menganalisis pengukuran secara kuantitas terhadap variabel yang dikaji atau dianalisis (Satori, 2010).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Analisis Pemilihan Model Persamaan 1

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut, yaitu dengan cara dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Penjelasan yang lengkap mengenai ketiga pengujian pemilihan model tersebut adalah sebagai berikut :

##### 4.1.1.1 Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*, pengujian tersebut dilakukan dengan program *Eviews*. Melakukan uji *Chow*, data diregresikan dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk di uji. Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0374 kurang dari 0,05 (probabilitas > 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa model *fixed effect* dan dapat dilanjutkan ke uji hausman.

##### 4.1.1.2 Uji Hausman.

Uji dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, pengujian tersebut dilakukan dengan program *Eviews*. Melakukan uji *Hausman Test* data juga diregresikan dengan model *random effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk di uji. Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0003 kurang dari 0,05 ( $Chi-Square < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa model *fixed effect*.

##### 4.1.2 Analisis Uji Asumsi Klasik Persamaan 1

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara infrastruktur jalan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah serta mengetahui lebih lanjut seberapa besar hubungan yang ditimbulkan antar variabel dependen dengan variabel independen digunakan bantuan program *Eview* dalam menganalisis data, dengan alat analisis regresi linear berganda. Di dalam analisis regresi berganda terdapat uji korelasi (R) yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat atau tidak

antara variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ), dan juga untuk mengetahui persentase sumbangan variabel independen terhadap variasi naik turunnya variabel dependen digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### **4.1.3 Analisis Uji Hipotesis Persamaan 1**

Langkah ketiga yang dilakukan adalah melakukan analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melakukan uji regresi berganda dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *R-Square* atau koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.188 atau 18,80 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen pajak daerah adalah sebesar 18,80%. Sedangkan sisanya sebesar 81,20 % dipengaruhi (dijelaskan) oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan regresi yang terbentuk adalah model Fixed Effect dikarenakan memiliki nilai signifikan F paling kecil dari ketiga model. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan proses transformasi logaritma (log), sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 16.633 + 0.092 X_{1it} + 4.130 X_{2it} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi untuk variabel infrastruktur jalan sebesar 0.092 (positif); artinya bahwa setiap terjadi peningkatan infrastruktur jalan sebesar satu satuan, maka pajak daerah akan meningkat sebesar 0.092 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya infrastruktur jalan maka bertambahnya pajak daerah sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap pajak daerah.
2. Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 4.130 (positif); artinya bahwa setiap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan, maka pajak daerah akan meningkat sebesar 4.130 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka bertambahnya pajak daerah sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap pajak daerah.

#### **4.1.4 Analisis Pemilihan Model Persamaan 2**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut, yaitu dengan cara dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Penjelasan yang lengkap mengenai ketiga pengujian pemilihan model tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Uji Chow**

Uji ini dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*, pengujian tersebut dilakukan dengan program *Eviews*. Melakukan uji *Chow*, data diregresikan dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk di uji. Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0224 kurang dari 0,05 (probabilitas >

0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa model *fixed effect* dan dapat dilanjutkan ke uji hausman.

## 2. Uji Hausman

Uji dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan fixed effect atau random effect, pengujian tersebut dilakukan dengan program Eviews. Melakukan uji Hausman Test data juga diregresikan dengan model random effect dan fixed effect terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk di uji. Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0014 kurang dari 0,05 ( $\text{Chi-Square} < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa model fixed effect.

### 4.1.5 Analisis Uji Asumsi Klasik Persamaan 2

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara infrastruktur jalan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah serta mengetahui lebih lanjut seberapa besar hubungan yang ditimbulkan antar variabel dependen dengan variabel independen digunakan bantuan program Eview dalam menganalisis data, dengan alat analisis regresi linear berganda. Di dalam analisis regresi berganda terdapat uji korelasi ( $R$ ) yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat atau tidak antara variabel independen ( $X_1, X_2$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ), dan juga untuk mengetahui persentase sumbangan variabel independen terhadap variasi naik turunnya variabel dependen digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### 4.1.6 Analisis Uji Hipotesis

Langkah ketiga yang dilakukan adalah melakukan analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melakukan uji regresi berganda dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan regresi yang terbentuk adalah model Fixed Effect dikarenakan memiliki nilai signifikan  $F$  paling kecil dari ketiga model. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan proses transformasi logaritma ( $\log$ ), sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 4.445 + 0.232 X_{1it} + 12.560 X_{2it} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi untuk variabel infrastruktur jalan sebesar 0.232 (positif); artinya bahwa setiap terjadi peningkatan infrastruktur jalan sebesar satu satuan, maka pajak daerah akan meningkat sebesar 0.232 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya infrastruktur jalan maka bertambahnya pajak daerah sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap pajak daerah.
2. Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 12.560 (positif); artinya bahwa setiap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan, maka pajak daerah akan meningkat sebesar 12.560 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka bertambahnya pajak daerah sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap pajak daerah.



## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pajak Daerah**

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari infrastruktur jalan (X1) terhadap pajak daerah (Y). Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi sebesar 0.145. Dari hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.145 lebih besar dari 0,05 (probabilitas > 0,05) sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. Ketersediaan infrastruktur jalan dalam suatu daerah dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kebutuhan sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti distribusi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan mobilisasi dan memperlancar penyaluran barang dan jasa. Peranan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Barat sangat penting terutama dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat baik dibidang ekonomi maupun sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kamus ekonomi, infrastruktur merupakan akumulasi investasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang terdiri atas jalan raya, jalan kereta api, perumahan, rumah sakit, sekolah, persediaan air dan lain sebagainya.

Panjang jalan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sepanjang 13.822 Km terdiri dari : Jalan Nasional 1.665 Km, Jalan Provinsi 1.562 km serta Jalan Kabupaten/Kota 10.595 km. Jalan nasional sepanjang 1,500 Km (89,95%) dalam kondisi mantap, 165 Km (10,05%) dalam kondisi tidak mantap. Untuk Jalan Provinsi sepanjang 1,185.02 Km (75,85%) dalam kondisi mantap, 377.28 Km (24,15%) dalam kondisi tidak mantap. Sedang untuk jalan Kabupaten/Kota sepanjang 5.608,37 km (52,93%) dalam kondisi mantap dan 4.986,61 km (47,07%) dalam kondisi tidak mantap. Kondisi ini mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi. Hal tersebut disebabkan karena alokasi anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani serta masih banyaknya kendaraan yang lewat melebihi daya dukung jalan. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.

Untuk itu, peningkatan kualitas jaringan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti diketahui, semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri, karena akan mendukung dan memperlancar kegiatan perekonomian. Bahwa perkembangan infrastruktur jalan pada periode 2010-2018 untuk Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD dengan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Pajak daerah merupakan salah satu unsur penting PAD yang berperan penting dalam kegiatan pemerintah daerah seperti penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan proyek pembangunan daerah. Berdasarkan tingkat kewenangan daerah, pajak

daerah pada tingkat provinsi berperan penting dalam kegiatan pemerintah daerah provinsi seperti belanja pegawai hingga pembiayaan proyek yang menjadi kebutuhan provinsi. Pajak daerah kabupaten/kota juga memiliki peran yang sama dengan pajak daerah provinsi, hanya ruang lingkup pengelolaan atau alokasinya lebih kecil yaitu urusan daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

#### **4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pajak Daerah**

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap pajak daerah (Y). Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi sebesar 0.0291. Dari hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0045 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pajak daerah. Kegiatan ekonomi khususnya yang kemudian akan meningkatkan produktivitas ekonomi Provinsi Kalimantan Barat khususnya di setiap kabupaten/kota didalamnya Berdasarkan penjelasan tersebut, ketersediaan kondisi infrastruktur jalan yang lebih baik membutuhkan perhatian pemerintah daerah yang lebih serius. Pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya mengubah sistem sosial menuju kondisi yang lebih baik dan maju baik ditinjau dari segi material maupun spiritual. Pembangunan ekonomi adalah membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, dan industri. Keberhasilan pembangunan ekonomi memerlukan proses pertumbuhan yang bertumpu pada kemampuan perekonomian domestik, karena bantuan dana dari luar negeri hanya mampu mengawali dan mendorong proses pembangunan.

Perekonomian Kalimantan Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat berjalan hampir parallel di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional. Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2018 meningkat. Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2018 tumbuh 5,07% (yoy) atau meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,97% (yoy)<sup>1</sup>. Bahwa tingginya Pertumbuhan Ekonomi untuk setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dengan nilai rata-rata setiap mencapai 5,47 persen. Pada penelitian ini perkembangan Pertumbuhan Ekonomi periode 2010-2018 tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7,99 persen untuk Kabupaten Sintang dan Pertumbuhan Ekonomi terendah diperoleh oleh Kabupaten Sanggau pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,13 persen. Secara regional, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan secara umum. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2018 tersebut sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan yang sama sebesar 5,18% (yoy). Memasuki triwulan I 2019, perekonomian Kalimantan Barat diproyeksikan tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh 4,8- 5,2% (yoy). Penyebab perlambatan tersebut antara lain diperkirakan berasal dari menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan pangsa terbesar dalam PDRB Kalimantan Barat

Peningkatan pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan penerimaan pajak, dimana pajak dapat dipergunakan untuk mencapai membatasi konsumsi, meningkatkan dorongan untuk menabung dan menanam modal, mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, memodifikasi pola investasi, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memobilisasi surplus ekonomi. Selain itu, pemerintah dalam menggunakan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluaran dalam penyediaan sarana sosial seperti sekolah, jalan, dan lain-lain. Kemudian pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan fiskal yang mengatur tingkat pengeluaran total dalam perekonomian, sarana distribusi pendapatan. Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak akan menjamin kas negara. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga tidak dapat sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya pajak. Pajak daerah memiliki dua peranan penting yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai pengatur.

Upaya-upaya yang harus dilakukan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajib pajak. Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui: Penyempurnaan administrasi pajak, Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut dan Penyempurnaan Undang-Undang pajak Sedangkan upaya ekstensifikasi merupakan upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif.

## **5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.4365 lebih besar dari 0,05 (probabilitas  $> 0,05$ ) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap pajak.
2. Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0291 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas  $< 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pajak.

### **5.2 REKOMENDASI**

Pada penelitian ini terdapat rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan, yaitu seharusnya memperhatikan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang harus dilakukan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi serta

sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajib pajak. Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui cara yaitu Penyempurnaan administrasi pajak, Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut dan Penyempurnaan Undang-Undang pajak, perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan Perluasan objek pajak.

2. Berdasarkan hasil penelitian hendaknya kedepan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pajak daerah antara lain meningkatkan infrastruktur jalan dan pertumbuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Cetakan Kedua*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Boediono. (2014). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro*. BPFE: Yogyakarta.
- Cerly M. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Jumlah Penduduk Dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18 (05). 198-209.
- Dian A. (2018). Analisis Hubungan antara Infrastruktur Jalan dan Tax Capacity: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Edisi Khusus Call for Paper*. 1 (1). 33-50.
- Dian. T. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *e- Proceeding of Management*. 3 (1). 320-330.
- Farik H. (2018). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Dan Penerimaan Pajak Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal EcoGen*. 1 (3). 586-595.
- Grigg, N. (2000). *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Sons: New York.
- Hariwijaya. (2011). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit Oryza: Jakarta.
- Muana. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Nurhidayati I. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Economix*. 3 (1). 46-57.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Satori, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Siswanto, V. (2012). *Strategi dan langkah-langkah Penelitian*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada: Jakarta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. ANDI: Yogyakarta.
- Sutopo. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Universitas. Sebelas Maret Press: Surakarta.
- Priyatno, D. (2011). *Buku Saku Analisis Statistik Data*. Penerbit MediaKom: Yogyakarta.